

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KAN MEWAJIBKAN
ANAK LULUSAN SD MASUK KE PONDOK PESANTREN RIADHUS
SHOLIHIN DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN IV NAGARI
KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



Oleh

**KHAIRIAH
NIM: 15058042/2015**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

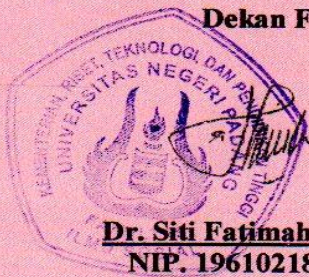
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN KAN MEWAJIBKAN ANAK
LULUSAN SD MASUK KE PONDOK PESANTREN RIADHUS SHOLIHIN
DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nama : Khairiah
NIM/TM : 15058042/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

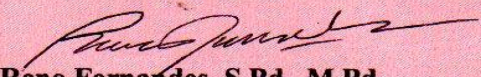
Padang, Agustus 2019

**Mengetahui,
Dekan FIS UNP,**



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

**Disetujui Oleh,
Pembimbing,**


Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd
NIP. 19870323 201504 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2019

Respon Masyarakat terhadap Kebijakan KAN Mewajibkan Anak Lulusan SD
Masuk ke Pondok Pesantren Riadhus Sholihin di Nagari Koto Baru
Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung

Nama : Khairiah
NIM/TM : 15058042/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

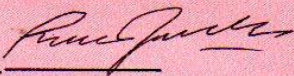
Padang , Agustus 2019

Tim Penguji:

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd

1. 

2. Anggota : Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si

2. 

3. Anggota : Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos., M.Si

3. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairiah
NIM/TM : 15058042/2015
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Respon Masyarakat terhadap Kebijakan KAN Mewajibkan Anak Lulusan SD Masuk ke Pondok Pesantren Riadhus Sholihin di Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung”** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001



Khairiah
NIM. 15058042

ABSTRAK

Khairiah. 15058042/2015. “Respon Masyarakat terhadap Kebijakan KAN Mewajibkan Anak Lulusan SD Masuk ke Pondok Pesantren Riadhus Sholihin di Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang 2019.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah aturan atau kebijakan KAN yang ada di Nagari Koto Baru. Kebijakan tersebut mengharuskan anak nagari untuk sekolah di MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin yang merupakan sekolah milik yayasan nagari. Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Nomor: 188. 47/ -KPTS-KAN-2018. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena sejauh ini belum ditemukan pihak KAN/ nagari mengatur pendidikan bagi masyarakatnya dan hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon masyarakat terhadap kebijakan KAN mewajibkan anak lulusan SD masuk ke Pondok Pesantren Riadhus Sholihin di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman dengan gagasan dasarnya yaitu tindakan seseorang mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi. Penelitian ini menekankan pada pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Pemilihan informan secara *purposive sampling* sebanyak 21 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data berupa metode, sumber dan waktu penelitian. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang di populerkan oleh Mathew Milles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan respon masyarakat Nagari Koto Baru terhadap kebijakan KAN tersebut ada yang merespon secara positif dan ada juga yang merespon negatif. Respon yang ditunjukkan masyarakat tersebut dalam bentuk tindakan. (1) Masyarakat yang merespon positif dengan adanya kebijakan KAN dengan memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Riadhu Sholihin karena menurut mereka hal tersebut baik untuk anak nagari dalam memperdalam ilmu agama dan juga demi memajukan pondok. (2) Masyarakat yang merespon negatif kebijakan tersebut berpendapat bahwa anak nagari tidak akan berkembang jika hanya sekolah di nagari sendiri dan pihak KAN/ nagari tidak seharusnya memaksa masyarakat kemana harus melanjutkan pendidikan

Kata Kunci: Respon, Masyarakat, Kebijakan, KAN

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahhirabbil‘alamin, segala puji hanya berhak diperuntukkan kepada Allah, penulis mengucapkan syukur yang tak bisa diungkapkan atas berkah dan rahmat yang telah penulis terima selama ini. Terutama pada saat penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Respon Masyarakat terhadap Kebijakan KAN Mewajibkan Anak Lulusan SD Masuk ke Pondok Pesantren Riadhus Sholihin di Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung”**. Shalawat serta doa juga penulis ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan yang lebih baik dengan risalah hidup akan aman dengan iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan strata satu di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Terutama orang tua dan keluarga yang tak henti berdoa demi selesainya *study* ini. Terkhusus kepada Ayahanda (Bapak Anwar (alm)), Ibunda (Ibu Rubani) dan saudara penulis yaitu Kakanda (Rabi’ulawal, Jonnedi, Desniati, dan Yannani). Serta keponakan penulis yang telah memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis demi kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada bapak Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing, atas jasanya yang takkan terbalas selama proses penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Ibu Ike Sylvia, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd.,M.Si dan bapak Dr. Eka Vidya Putra,S.Sos.,M.Si sebagai tim penguji proposal yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si selaku dosen PA penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan. Staf administrasi Jurusan Sosiologi kakak Fifin Fransiska, Wezy Restu Awiandora, ST, dan Rhavy Ferdyan, S.Pd yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan pengurusan skripsi ini.
5. Bapak Camat IV Nagari, Bapak Wali Nagari Koto Baru yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan penulis untuk mendapatkan izin penelitian, mendapatkan data dan melakukan penelitian. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada informan penelitian masyarakat Nagari Koto Baru yang telah memberikan informasi, data serta pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial khususnya angkatan 2015 yang telah memberikan banyak dukungan, bantuan dan masukan baik selama perkuliahan maupun selama penyelesaian skripsi ini.
7. Keluarga *Jawkir* Yovi Oktialista, Mega Wirmadani, Difri Maza. R, Meliza yang telah membantu menyumbangkan pemikiran, masukan serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penyelesaian skripsi ini. Nani Wijaya S.Pd selaku senior, sahabat yang telah banyak menyumbangkan pemikiran, memberikan saran dan motivasi serta mengorbankan waktu bahkan perasaan dari awal masuk kuliah hingga penulis sampai pada titik ini. Teman unyilku Novianis & Ayu Lestari yang menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Trizki Amelia, Diana Sri Mayani, Miftahul Jannah (Ayuk), Izza Nurlaili yang menemani

8. penulis selama menyusun skripsi ini dan selalu memberikan semangat. Kemudian kepada teman-teman satu dosen pembimbing Yorisa Yora Marwa, Trilorya Elizabeth Sinaga, Yuni Eka Putri dan Vera Yulinda yang selalu menyemangati dan memberi saran kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Kemudian kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk data penelitian skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan bagi penulis pada khususnya.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Penjelasan Konsep.....	13
1. Respon.....	13
2. Kebijakan.....	13
3. Kerapatan Adat Nagari.....	14
4. Nagari.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	15
1. Lokasi Penelitian.....	16
2. Pendekatan dan tipe penelitian.....	16
3. Pemilihan informan.....	17
4. Teknik pengumpulan data.....	18
H. Triangulasi Data.....	21
I. Analisis Data.....	22
BAB II NAGARI KOTO BARU DAN KEBIJAKAN KAN.....	26
A. Kondisi Geografis Nagari Koto Baru.....	26
B. Kondisi Demografi Nagari Koto Baru.....	27
1. Kependudukan	27

2. Mata pencaharian	28
3. Pendidikan	30
4. Agama	31
5. Kesehatan	32
C. Kehidupan sosial Nagari Koto Baru.....	32
D. Latar Belakang BerdirinyaMTsS/ PonpesRiadhusSholihin.....	34
E. Kebijakan KAN di Nagari Koto Baru.....	46

**BAB III PEMBAHASAN: RESPON MASYARAKAT TERHADAP
KEBIJAKAN KAN MEWAJIBKAN ANAK LULUSAN SD MASUK KE
PONDOK PESANTREN RIADHUS SHOLIHIN DI NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG.....49**

A. Respon Positif Masyarakat terhadap Kebijakan.....	50
B. Respon Negatif Masyarakat terhadap Kebijakan.....	56

BAB IV PENUTUP.....60

A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA.....65

LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

1. Analisis Data Model Interaktif (<i>Interactif Model of Analisis</i>) Oleh Miles dan Huberman.....	25
2. Struktur sekolah.....	43
3. Keadaan sekolah.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel:

1. Jumlah penduduk perjorong.....	27
2. Pekerjaan penduduk Nagari Koto Baru.....	28
3. Jumlah siswa yang masuk MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin periode 2014/2015 s/d 2018/2019.....	36
4. Jumlah mata pelajaran dan guru.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Daftar Informan Penelitian
4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas
5. Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL
6. Surat Izin Penelitian dari Camat
7. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan sebuah proses bertahap yang terlaksana secara terstruktur dan ada aturan yang mengikat, yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak tertentu yang merupakan komponen utama di dalam proses belajar mengajar (Sriyono, 2015). Sebagai sebuah institusi sosial, pendidikan dapat dijadikan tumpuan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan menjadi sarana bagi pembentukan intelektualitas, bakat, akhlak serta kecakapan masyarakat. Dalam definisi lain pendidikan merupakan medium yang sangat penting untuk mencari jati diri dan mengangkat harkat martabat suatu bangsa (Fernandes, 2018)..

Pendidikan sebagai penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa. Pendidikan bisa mengangkat derajat seseorang bahkan suatu bangsa akan dihargai karena pendidikannya. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melalui pendidikan, manusia bisa berfikir dalam menentukan masa depan yang baik bagi kehidupannya. Pendidikan di Indonesia dijalankan melalui tiga saluran yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Ristekdikti.go.id, 2016).

Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur formal terdiri pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Selanjutnya pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, disediakan bagi warga Negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kejar paket A, B, dan C merupakan pendidikan non formal. Pendidikan non formal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olah raga, dan pramuka (Bafadhol, 2017).

Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam pendidikan, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai pengguna pendidikan, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih ke sekolah mana mereka harus melanjutkan pendidikannya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Negara kita adalah Negara demokrasi, maka setiap warga Negara memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan memilih institusi pendidikan yang diinginkan. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan konsep pendidikan berbasis masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa memberatkan masyarakat dari segi apapun. Berbagai komponen pendidikan seperti tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, visi, misi, tujuan, dasar, guru yang dibutuhkan, evaluasi, lulusan, pendidikan harus dirancang sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga hasil dari suatu lembaga pendidikan bisa berguna dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pondok pesantren termasuk salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat, dimana ia lahir dan berkembang dari masyarakat.

Pendidikan berbasis masyarakat juga terjadi di Sumatera Barat. Salah satunya MTsS/Ponpes Riadhus Sholihin yang terletak di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Masyarakat di Nagari tersebut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan membangun sebuah Pesantren dengan swadaya masyarakat. Pondok pesantren Riadhus Sholihin berdiri di bawah yayasan milik nagari yaitu yayasan Riadhus Sholihin. Masyarakat mendirikan pesantren dengan tujuan agar anak-anak nagari dapat menimba ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dan tidak meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya. Jadi, Pondok Pesantren Riadhus Sholihin didirikan untuk mencetak para ulama, membentuk anak nagari Koto Baru menjadi manusia yang berilmu dan berakhlakul karimah sekaligus tidak meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya.

Pembangunan MTsS/Ponpes Riadhus Sholihin diiringi dengan adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh Nagari Koto Baru tentang keharusan anak nagari sekolah di MTsS/Ponpes Riadhus Sholihin tersebut, dan dikenakan sanksi bagi yang sekolah keluar. Kebijakan tersebut tercantum dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Nomor: 188. 47/ -KPTS-KAN-2018 tentang “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin”. Dalam kebijakan yang dikeluarkan tersebut bahwa bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB III Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan “Pendidikan

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh KAN ini bertujuan untuk memajukan Pondok Pesantren Riadhus Sholihin. Kebijakan mengenai sanksi bagi yang sekolah keluar dari MTsS/Ponpes Riadhus Sholihin ini mengalami perubahan. Awalnya denda diberlakukan hanya sebesar Rp 500.000, kemudian berubah menjadi Rp 1.000.000 karena melihat kondisi sekolah yang membutuhkan dana lebih. Perubahan keputusan ini berlaku dari tahun 2015 sampai saat ini. Apabila ada yang sekolah keluar dan belum melunasi denda yang telah ditetapkan, maka pemerintahan Nagari Koto Baru tidak akan melayani pengurusan surat menyurat sampai denda tersebut lunas dibayar.

Fenomena sebuah institusi pendidikan diselenggarakan oleh pemerintahan terendah Sumatera Barat yaitu nagari merupakan sesuatu yang unik dan menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini karena pemerintah nagari berperan dalam mengatur pendidikan bagi masyarakatnya dengan mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengharuskan anak nagari yang tamat SD untuk melanjutkan sekolah ke MTsS/ pondok pesantren Riadhus Sholihin. Kemudian penyelenggaraan pendidikan pesantren biasanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam naungan yayasan swasta. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Nagari Koto Baru mengenai pendidikan merupakan kebijakan yang langka sekaligus sebenarnya bertentangan dengan prinsip pendidikan di Indonesia. Disatu sisi masyarakat memiliki hak untuk mengatur dan

mengelola pendidikan. Namun disisi lain, pendidikan merupakan sesuatu yang privasi dan hak azazi, maksudnya setiap masyarakat memiliki hak memilih sekolah sebagai tempat melanjutkan pendidikannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sepanjang penelusuran penulis belum ada penelitian lain yang membahas posisi Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah mengatur sistem pendidikan dan bagaimana penerimaan atau penolakan (respon) masyarakat terhadap peraturan tersebut. Penelitian yang berhubungan dengan respon terhadap kebijakan dilakukan beberapa peneliti berikut. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nora Susilawati dan Reno Fernandes yang meneliti tentang “Respon Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Sekolah Inklusif Di Kota Padang)”. Temuannya adalah bahwa kebijakan pendidikan inklusif di Kota Padang merupakan kebijakan yang bersifat *top-down* maksudnya kebijakan pendidikan inklusif idealnya diusulkan oleh sekolah sebagai penyelenggara, namun tidak terjadi di kota Padang, penetapan sekolah penyelenggara inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang tanpa ada pertimbangan kesiapan sekolah. Implementasi pendidikan inklusi di kota Padang meskipun dengan kesiapan yang minim, namun sekolah merespon dengan tetap menjalankan pendidikan inklusi dengan segala keterbatasannya. Sekolah dalam menjalankan fungsinya cenderung melakukan pemeriharaan sistem dan menjaganya tetap dalam keseimbangan (equilibrium) dengan sistem lainnya (Susilawati & Fernandes, 2017)

Kedua, penelitian lain yang dilakukan oleh Ardhianing Guspita tentang “Respon Masyarakat Terhadap Program Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Al- Khoeriyah Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”. Temuannya adalah bahwa PAUD dapat memajukan mutu pendidikan di desa banjarharjo dan mendapatkan respon positif yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah siswa yang bersekolah di PAUD KB Al- Khoeriyah. Faktor penghambatnya juga ada yaitu kondisi ekonomi masyarakat miskin, sarana prasarana alat peraga edukatif luar dan dalam kurang memadai. Faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan dari kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan tentang program pelayanan PAUD (Guspita, 2010)

Berdasarkan penelitian di atas terdapat respon dari sekolah dan masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Berbagai hambatan juga terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sementara belum ditemukan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah nagari yang mengahruskan anak nagari harus sekolah di sekolah milik yayasan nagari yang mana bila melanggar akan dikenakan sanksi dengan mmembayar denda. Maka dari itu masalah ini menarik dikaji secara sosiologis mengenai Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Pendidikan di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada respon masyarakat terhadap kebijakan pendidikan nagari mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin”. Pada umumnya pemerintah nagari tidak terlalu terlibat dalam hal mengatur masalah pendidikan, seperti menentukan sekolah mana yang harus dimasuki oleh anak setelah menamatkan satuan pendidikan tertentu. Pemerintah nagari di bidang pendidikan biasanya hanya terlibat dalam mengeluarkan surat untuk keberlangsungan pendidikan, seperti halnya untuk mendapatkan siswa baik di tingkat pendidikan yang sama maupun untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Berbeda halnya pada masyarakat Koto Baru, pemerintah nagari memiliki peran yang sangat dominan dalam mengatur pendidikan. Pemerintah nagari Koto Baru terlibat dalam mengatur sekolah yang harus dimasuki anak setelah menamatkan Sekolah Dasar (SD). Anak-anak Nagari Koto Baru diharuskan untuk melanjutkan pendidikan ke MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin, merupakan sekolah berada di bawah yayasan milik nagari. Hal menariknya adalah ada aturan tertulis yang dikeluarkan oleh KAN dan disepakati pemerintah nagari mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin”. Aturan ini tercantum dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Nomor: 188. 47/ -KPTS-KAN-2018. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana respon masyarakat terhadap

kebijakan KAN mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kebijakan KAN Koto Baru mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis: Menghasilkan karya ilmiah tentang “Respon Masyarakat terhadap Kebijakan KAN Mengenai “Sanksi Anak Kemenakan yang Tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin”. Selanjutnya diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang sosiologi dan hasil penelitian ini dijadikan rujukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Praktis: Sebagai bahan ajar yang relevan mengenai aturan lokal dalam mata pelajaran sosiologi.

E. Kerangka Teoritis

Pemerintah Nagari Koto Baru sangat terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakatnya. Pihak nagari dalam hal ini mengatur pendidikan bagi anak- anak yang tamat SD dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan ke MTsS/

Ponpes Riadhus Sholihin yang ada di nagari tersebut. Jika ada anak nagari tamat SD yang sekolah keluar dari ke MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin, maka akan dikenakan denda. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang diambil pihak nagari mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin”. Kebijakan atau aturan ini tercantum dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Nomor: 188. 47/ -KPTS-KAN-2018.

Aturan tersebut sudah disepakati oleh tokoh masyarakat, niniak mamak, dan pemuda. Namun dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Mereka tetap ada yang menyekolahkan anaknya ke sekolah lain selain dari MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin. Pada kasus ini menarik untuk dianalisis menggunakan teori pilihan rasional dari James S. Coleman dengan melihat bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pendidikan yang dibuat nagari berdasarkan pilihan rasional yang diambil masyarakat. Berdasarkan respon masyarakat nantinya akan diketahui tindakan yang mereka lakukan, apakah setuju ataupun tidak dengan kebijakan tersebut akan terlihat dari tindakan yang mereka lakukan.

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan

rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Meskipun teori pilihan rasional berawal dari tujuan atau aksud aktor, namun teori ini memperhatikan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber, aktor mempunyai sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumber daya lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber daya yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi bagi aktor yang mempunyai sumber daya sedikit, pencapaian tujuan mungkin sukar atau mustahil sama sekali. Sumber pemaksaan kedua atas tindakan aktor individual adalah lembaga sosial. Hambatan kelembagaan ini menyediakan baik sanksi positif maupun sanksi negatif yang membantu mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindari tindakan yang lain (George, 2014)

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Tetapi Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoretis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara perinci menuju ke tingkat sistem sosial: Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan, terlibat dalam sistem tindakan. Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya, yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.

Respon masyarakat terhadap kebijakan KAN di Nagari Koto Baru mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin” tepat dianalisis dengan teori pilihan rasional James S. Coleman. Respon dari masyarakat akan menghadirkan tindakan- tindakan yang beragam dari tiap individu. Tindakan individu dalam masyarakat memiliki tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut maka dengan memilih alternatif cara atau pilihan yang sesuai dengan nilai dan norma. Individu punya banyak pilihan yang dianggap efektif. Maka dia akan melakukan tindakan yang sesuai dengan cara yang dipilih yang menuntun dia pada pilihan yang paling rasional. Individu bertindak juga dikendalikan oleh nilai dan norma. Jadi respon dari masyarakat terhadap kebijakan

pendidikan di Nagari Koto Baru akan menghasilkan tindakan yang berbeda pada tiap individu sesuai dengan pilihan rasionalnya masing-masing.

F. Penjelasan Konsep

1. Respon

Respon artinya jawaban, balasan atau tanggapan. Secara umum respon dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa respon merupakan tanggapan, pendapat dari individu atau masyarakat terhadap suatu hal yang diamati ataupun dirasakan.

Secara umum, respon terdiri dari respon positif dan respon negatif. Respon positif yaitu apabila masyarakat atau individu mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang diselenggarakan oleh pribadi atau kelompok. Sedangkan respon negatif yaitu sebaliknya apabila masyarakat atau individu memberikan tanggapan atau reaksi negatif dan kurang berpartisipasi dalam menjalankan program yang dibuat oleh pribadi atau kelompok.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang member batas dan arah umum

kepada seseorang untuk bergerak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan- kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan- aturan keputusan.

3. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Menurut pasal 1 angka 15 Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008, Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga kerapatan adat nagari merupakan himpunan dari para niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat.

Adapun tugas dari KAN adalah: 1) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako, dan sangsako; 2) Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat; 3) Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau

silsilah keturunan/ ranji; 4) Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional; 5) Membina masyarakat hukum adat nagari menurut *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*; 6) Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari; 7) Bersama pemerintah nagari menjaga, memlihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

4. Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pasal 1 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah* dan/ atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi adalah tempat penelitian dilakukan, lokasi pada penelitian ini adalah di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Lokasi ini dipilih karena di Nagari Koto Baru terdapat sebuah aturan yang mengharuskan siswa yang tamat SD sekolah di MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin, bagi yang melanggar akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sehingga mendapat berbagai respon dari masyarakat mengenai aturan/ kebijakan dari pihak nagari tersebut. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Mei sampai 21 Juli 2019.

2. Pendekatan dan tipe penelitian

Berdasarkan permasalahan, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif berusaha mengungkap dan menjelaskan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari, secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Basrowi & Suwandi, 2008). Selanjutnya dengan penelitian kualitatif ini peneliti mendapatkan informasi berupa penuturan langsung atau respon dari pihak nagari, pihak sekolah dan masyarakat mengenai kebijakan yang ada di nagari tersebut

Jenis penelitian yang adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Metode ini menelaah mengenai suatu keadaan masyarakat yang dilihat dari persoalan atau kasus tertentu, baik dalam suatu lembaga, kelompok maupun individu (Syani, 2007). Studi kasus menekankan pada satu atau beberapa kasus secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks (Herdiansyah, 2014b).

Penelitian dilakukan secara mendalam terhadap suatu fenomena dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan respon masyarakat terhadap kebijakan KAN di Nagari Koto Baru. Peneliti menggali secara mendalam mengenai sejarah berdirinya MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin dan menjelaskan alasan kenapa muncul aturan mengenai keharusan sekolah di MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung serta respon dari masyarakat mengenai kebijakan tersebut.

3. Pemilihan informan

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* (sample bertujuan), yaitu menentukan kriteria-kriteria tertentu setelah informannya jelas. Kriteria-kriteria ini dibuat berdasarkan tujuan yang

ingin dicapai dan data yang ingin didapatkan. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti sudah memiliki pemetaan terhadap siapa yang akan diteliti atau siapa yang akan menjadi informan penelitian. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah: (1) pemerintah nagari; (2) pihak sekolah; (3) masyarakat (niniak mamak, orang tua yang anaknya sekolah atau pernah sekolah dan/ anaknya yang tidak masuk MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin dan masyarakat umum lainnya).

Informan dalam penelitian ini berjumlah 21 Orang. Diantara informan tersebut adalah: (1) dua orang pemerintah nagari Koto Baru, (2) tiga orang pihak sekolah dan yayasan, (3) lima orang tokoh masyarakat yang terdiri dari niniak mamak dan ketua KAN, (4) sebelas orang (masyarakat umum) enam orang anaknya sekolah di dalam dan lima orang anaknya sekolah keluar dari MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi/ pengamatan, *interview*/ wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan gejala yang ada pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan

data dengan mengamati secara langsung ke lapangan masyarakat yang akan diteliti. Seorang peneliti diharapkan melakukan observasi partisipasi, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh orang atau masyarakat yang akan diteliti. Peneliti tidak memberitahukan maksudnya kepada kelompok yang diselidikinya. Peneliti dengan sengaja menyembunyikan bahwa kehadirannya di tengah-tengah kelompok yang diselidikinya itu adalah untuk meneliti (George, n.d.).

Dalam penelitian ini yang diobservasi (diamati) ini adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah nagari dan pihak sekolah serta masyarakat (anaknya) yang dikenai aturan tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2012). Hal yang diamati oleh peneliti meliputi: (1) orang (*actor*) adalah pemerintah nagari, pihak sekolah dan masyarakat yang dikenai aturan, (2) aktivitas (*activity*) adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah nagari, pihak sekolah dan masyarakat yang dikenai aturan,, (3) latar (*setting*) adalah tempat, suasana, dan waktu melakukan penelitian di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau masyarakat yang diteliti. Wawancara ini dilakukan secara mendalam (*indept interview*), yaitu untuk mendapatkan dan menggali informasi secara lengkap dan akurat. Wawancara (*interview*) untuk keperluan penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut. Dengan demikian, wawancara berbeda dengan ngobrol, bercakap-cakap, dan beramah-tamah (Suyanto, 2011).

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam ini disebut juga dengan wawancara tidak terstruktur, karena wawancara ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana, 2010).

Peneliti melakukan wawancara pada pagi, siang dan sore hari. Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi kantor wali nagari, sekolah MTsS/ Ponpes Riadhus Sholihin, rumah-rumah niniak mamak atau masyarakat yang bersangkutan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan

data serta membuat catatan lapangan dari hasil wawancara. Peneliti juga menggunakan handphone untuk merekam hasil wawancara dengan para informan penelitian.

c. Studi Dokumen

Studi dokument merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2014a).

Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (Basrowi & Suwandi, 2008). Pada penelitian ini peneliti memperoleh data tentang jumlah penerimaan siswa di MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin periode 2014/2015 – 2018/2019, kemudian aturan tertulis dari nagari tersebut mengenai sanksi bagi anak yang melanggar aturan sesuai dengan kesepakatan.

H. Triangulasi Data

Pengujian keabsahan data dapat dilakukan salah satunya dengan triangulasi data. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan

sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah diperoleh peneliti. Teknik triangulasi ada beberapa macam antara lain adalah triangulasi sumber, metode dan waktu.

Triangulasi sumber artinya peneliti mengecek kembali data yang diperoleh melalui berbagai sumber, data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data tersebut. Triangulasi metode adalah pengecekan data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti juga bisa melakukan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Selanjutnya adalah triangulasi waktu, yaitu pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi atau teknik lain dalam situasi waktu yang berbeda.

I. Analisis Data

Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data

yang kredibel sesuai dengan yang diharapkan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian dilakukan secara berulang dan terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, karena yang diteliti adalah proses maupun produk dari proses. Untuk itu dalam mengumpulkan data selalu dilengkapi dengan pembuatancatatan lapangan. Catatan lapangan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mencatat informasi hasil wawancara dan hasil pengamatan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Singkatnya, analisis data dilakukan dalam dua tahapan, yaitu selama proses pengumpulan data dan pada akhir pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman ada tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Basrowi & Suwandi, 2008).

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selama penelitian, reduksi data terus berlangsung guna menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikannya sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai Respon Masyarakat terhadap Kebijakan KAN mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak

masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung”.

2. Penyajian Data

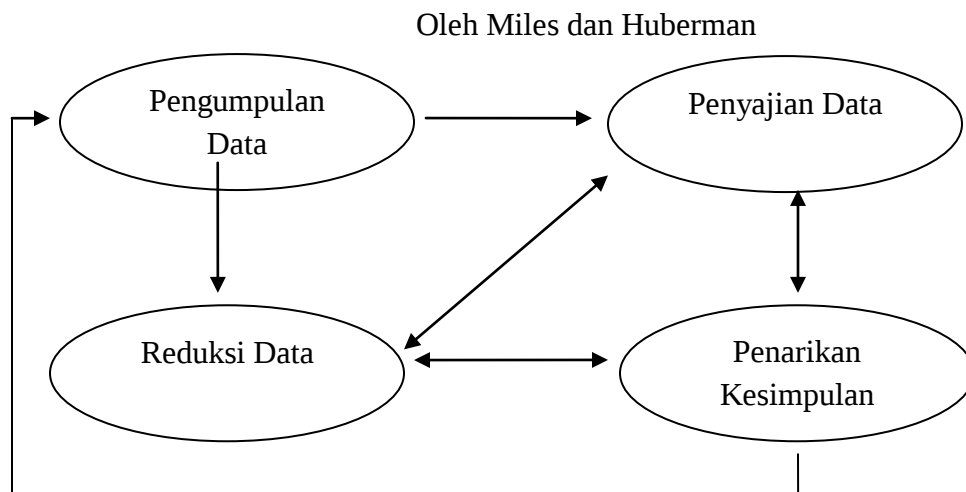
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti melakukan pengelompokan data secara tersusun, agar mempermudah peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan sekumpulan data atau informasi, maka penulis mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan peneliti mengenai Respon Masyarakat terhadap Kebijakan KAN mengenai “sanksi anak kemenakan yang tamat SD yang tidak masuk ke MTsS/ Pondok Pesantren Riadhus Sholihin di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti juga melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Selama proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan diuji kebenaran dan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian sehingga validitasnya terjamin. Data yang diperoleh dari lapangan ditarik kesimpulannya sehingga menjadi hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dan bertahap dari kesimpulan sementara sampai pada

kesimpulan akhir. Penulis bersikap terbuka terhadap kesimpulan yang didapat sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa pemikiran yang timbul ketika menulis dengan melihat kembali *fieldnote* atau catatan lapangan dan membandingkan dengan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila terjadi kesalahan data yang mengakibatkan kesimpulan tidak sesuai, maka dilakukan proses ulang dengan melalui tahapan yang sama. Untuk lebih jelasnya mengenai teknik analisa data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2: Analisa Data Model Interaktif (*Interaktif Model Analisis*)



Sumber: Matthew B. Miles A. Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. New York: SAGE Publications, hlm. 23